

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urgensi mengapa penelitian ini dilaksanakan, terdapat dua latar belakang pokok, yakni latar belakang teoritis dan empirik. Latar belakang yang pertama adalah teoritis yang berdasarkan hasil atau temuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Pertama, sektor industri merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berperan dalam perekonomian negara karena dapat mewujudkan struktur ekonomi negara yang semakin berkembang. Menurut UU No. 3 Tahun 2014, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi untuk mengolah bahan baku dengan memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.¹ Tentunya setiap daerah pasti memiliki potensi sektor industri yang berbeda-beda. Menurut Philip Kristanto, industri ini dapat digolongkan menjadi industri hulu dan industri hilir. Industri hulu ini lebih bersifat padat modal dan berskala besar serta menggunakan teknologi yang maju seperti industri kimia dasar, industri mesin, logam dasar, dan elektronik. Sedangkan industri hilir ini

¹ <http://kemenperin.go.id/regulasi/>, diakses pada tanggal 1 September 2018 10.12 WIB

lebih mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi dan sifatnya lebih kreatif.²

Sektor industri mebel merupakan salah satu industri yang berkembang di Negara Indonesia dan telah tersebar di berbagai daerah. Industri ini termasuk dalam golongan industri hilir karena prosesnya lebih panjang dibandingkan dengan industri hulu. Industri ini juga memiliki sifat padat modal, dan menggunakan teknologi dalam memproduksinya. Sehingga industri ini merupakan industri pengolahan yang mana menghasilkan produk perabotan rumah atau berbagai *furniture* yang terbuat dari bahan baku kayu. Produk industri ini memiliki desain interior dan nilai artistik yang tinggi bagi penggunanya. Permintaan produk industri mebel terus meningkat bertujuan untuk menunjang berbagai aktifitas sehari-hari. Peminatnya bukan hanya dari dalam negeri namun juga sudah menjangkau di luar negeri. Industri mebel berperan penting dalam menunjang pembangunan perekonomian. Selain komoditas mebel yang dihasilkan indah dan menarik, industri ini merupakan salah satu komoditas ekspor yang tinggi yang berkontribusi besar bagi devisa negara.

Kedua, menurut High Smith, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan industri dapat berkembang atau justru mengalami kegagalan. Setiap industri tentunya tidak semua berjalan dengan lancar dan sukses. Tidak semua industri dapat berjalan lancar dan sukses karena pasti setiap pelaku usahanya akan menghadapi berbagai permasalahan yang nantinya dapat menjadi faktor

² Verawati, Sri. 2012. *Peran Modal Sosial Dalam Strategi Industri Kreatif (Studi di Sentra Kerajinan Kayu Jati di Desa Jepon Blora Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

penghambat bagi mereka. Faktor-faktor tersebut diantaranya berupa faktor sumber daya, faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor kebijakan pemerintah. Faktor sumber daya ini berkaitan dengan kondisi sumber daya yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Sedangkan faktor sosial berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat baik itu tenaga kerja dan kemampuan dalam memproduksi sebuah produk. Faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi perekonomian di sebuah daerah ataupun kondisi perekonomian seorang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dan yang terakhir faktor kebijakan pemerintah yang mana, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan berpengaruh bagi pelaku industri mebel baik itu ketentuan dalam mengatur ekspor, impor, dan lainnya. Dalam, hal ini, maka pelaku industri pasti memiliki suatu permasalahan tidak akan mudah mengalami perkembangan. Sehingga terdapat faktor-faktor yang harus diketahui terlebih dahulu dalam mendirikan sebuah usaha atau industri.³

Ketiga, menurut Carl I. Friedrich, kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dikarenakan terdapat ancaman dan peluang. Kebijakan diusulkan tersebut bertujuan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁴ Dari definisi yang dijelaskan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebuah kebijakan ini dibuat atas dasar usulan yang mana muncul atas keresahan dari adanya isu yang muncul atau yang sering disebut masalah publik agar dapat dicarikan solusi pemecahan masalah. Sehingga pembuat

³<https://www.psychologymania.com/2013/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-industri.html>, diakses pada hari Selasa, 24 September 2019, pukul 08.11 WIB.

⁴ Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal 126

kebijakan sudah terlebih merencanakan dengan memikirkan tujuan-tujuan yang nantinya harus dicapai. Harapannya dengan dibuatnya kebijakan dapat menyelesaikan masalah publik yang sedang terjadi.

Keempat, Menurut Charles O. Jones, ia mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang direncanakan untuk menilai hasil program pemerintah pemerintah yang memiliki perbedaan dalam spesifikasi objek, teknik, pengukuran dan metode analisa.⁵ Aktivitas tersebut untuk mengetahui dampak kebijakan baik yang diharapkan atau tidak diharapkan pada masalah ataupun masyarakat dalam situasi sekarang ataupun yang akan datang.⁶ Pengukuran kinerja evaluasi menurut Bridgman and Peter Davis Glyn dapat dilakukan berdasarkan indikator *input, process, output, dan outcome*. Dalam mengukur sebuah kebijakan tersebut dapat menggunakan kriteria menurut William Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Evaluasi kebijakan adalah tahapan terakhir dalam kebijakan publik.

Evaluasi ini sangat penting dilakukan, dengan adanya evaluasi maka dapat mengetahui sejauh mana sebuah kebijakan dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan dengan tujuan dalam kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila sebuah kebijakan tersebut tidak berhasil, maka dengan melakukan evaluasi dapat memperbaiki sebuah kebijakan tersebut ataupun menghasilkan solusi lain agar nantinya mampu meraih dampak yang diinginkan

⁵ Islamy M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara. Hal 115

⁶ Ibid, 117-119

oleh pembuat kebijakan dan tentunya dampak yang diinginkan pasti adalah dampak positif dimana mampu memberikan perubahan bagi masyarakat.

Sedangkan latar belakang kedua yaitu empirik yang merupakan kejadian nyata yang benar-benar terjadi dalam suatu kehidupan yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Kabupaten Jepara merupakan sebuah kabupaten yang terletak di utara Pulau Jawa dan tepatnya di utara Provinsi Jawa Tengah serta memiliki jumlah penduduk sekitar 1.223.198 jiwa dengan populasi tertinggi di Kecamatan Tahunan sekitar 117.170 jiwa dan populasi terkecil di Kecamatan Karimunjawa sekitar 9.514. Kabupaten Jepara merupakan wilayah dengan karakteristik industri padat karya ukir, yang mana dikenal sebagai daerah industri mebel. Hampir 75% masyarakatnya menekuni usaha ini sebagai mata pencahariannya.⁷ Hasil produk industri mebel Jepara ini memiliki ciri khas tersendiri pada motif ukirannya karena merupakan hasil budaya lokal dan memiliki nilai estetik yang tinggi yang dapat menarik para pecinta seni. Sehingga produk industri mebel Jepara ini telah dikenal di berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara. Oleh karena itu, Kabupaten Jepara dikenal dengan “Jepara Kota Ukir” dan juga mendapatkan gelar sebagai *The World Carving Center*. Gelar tersebut merupakan upaya pemerintah daerah Jepara untuk memberikan apresiasi bagi para pelaku industri mebel Jepara terhadap kualitas produk *furniture* yang dihasilkan serta sebagai bentuk branding bagi daerah Jepara. Melihat perannya yang penting karena berkontribusi terhadap

⁷ Meily Murdiyani. (2015). *Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Rangka Fasilitasi Terhadap Industri Mebel Dalam Perdagangan Bebas (Studi Kasus Berlangsungnya ACFTA)*. Jurnal. Universitas Diponegoro.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara. Bahkan industri ini selalu menjadi sektor unggulan dan seringkali dianggap sebagai tulang punggung perekonomian di Jepara, yang mana dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Peringkat Industri Mebel sebagai Sektor

Industri di Kabupaten Jepara Tahun 2015-2017

No	Tahun	Peringkat
1.	2015	1
2.	2016	1
3.	2017	1

Sumber : Disperindag Kab. Jepara Tahun 2019, Data Diolah

Tabel 1.2

Urutan 3 Besar Industri di Kabupaten Jepara Tahun 2017

No	Jenis Komoditas	Volume (kg)	Nilai Ekspor
1.	Furniture Kayu	45.920.345,60	2.231.446.505,63
2.	Produk Garmen dan Sepatu	35.131.859,70	1.078.939.031,73
3.	Komoditas Lainnya	30.114.353,17	157.805.123,67

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun 2017, Data Diolah

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa industri mebel ini menjadi *leading sector* perekonomian di Jepara. Setiap tahunnya pasti menempati posisi pertama yang memberikan kontribusi besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kabupaten Jepara.

Kedua, Kabupaten Jepara sebagai Kota dengan industri yang cukup banyak dan tentunya terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan industri mebel kearah yang lebih baik atau justru kegagalan. Sehingga keterlibatan pemerintah akan selalu ada dalam kegiatan industri dikarenakan industri menjadi tonggak bagi perekonomian Negara. Pemerintah ini memiliki wewenang untuk membuat kebijakan guna mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi karena apabila industri yang berkembang tersebut mengalami penurunan akan menjadi permasalahan yang serius bagi sebuah Negara atau daerah. Oleh karena itu,keberadaan industri mebel di Jepara yang semakin terancam karena munculnya berbagai hambatan dan tantangan yang ada bagi perkembangan industri mebel di Jepara, maka Pemerintah daerah Jepara mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan daerah Jepara yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM). Perda ini sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha industri mebel yang lebih baik dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan asosiasi-asosiasi yang berkembang dalam bidang industri ini sehingga terjalinnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara aktif berpartisipasi untuk memajukan industri mebel di Jepara. Dalam lingkup kebijakan dalam Perda ini yaitu perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel yakni :

Perlindungan ini sebagai bentuk usaha menjaga keberadaan sebuah industri dan juga melindungi dari adanya hal-hal yang dapat berpotensi untuk menghambat dan merugikan pertumbuhan serta perkembangan dari industri.

Upaya perlindungan industri mebel ini dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana untuk mendukung industri mebel seperti jalan, jembatan dan jaringan listrik, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, adanya kepastian harga produk, pemberian bantuan hukum, dan asuransi industri mebel bagi pelaku usahanya.

Sedangkan pemberdayaan, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan perubahan terhadap sektor industri, sebagai bentuk usaha menjaga keberadaan industri. Pemberdayaan industri mebel ini sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan industri mebel yang mana dilakukan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel yang dilakukan melalui adanya pemberian pendidikan, pelatihan penyuluhan dan pendampingan industri mebel, adanya standar kualitas mebel, pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel, membangun kemitraan industri mebel dengan para pihak, menyediakan fasilitas pembiayaan dan permodalan industri mebel, serta menguatkan kelembagaan pelaku usaha industri mebel seperti asosiasi-asosiasi dibidang industri mebel yang sudah berkembang di Jepara.

Sedangkan pembinaan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan potensi sumber daya manusianya agar lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan orang-orang asing. Pembinaan ini dapat dilakukan bertujuan untuk membimbing para pelaku industri mebel serta memberikan bantuan konsultasi jika mereka sedang mengalami permasalahan yang mana untuk memberikan motivasi bagi mereka. Sehingga Pemda Jepara berkewajiban melakukan pembinaan kepada

para pelaku industri mebel dengan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian program-program seperti pelatihan dan pendidikan.

Selain tiga lingkup kebijakan tersebut, pembiayaan dan pendanaan juga merupakan lingkup kebijakan yang menjadi fokus utama untuk membantu para pelaku industri mebel. Pembiayaan dan pendanaan tersebut yakni dana yang diberikan pemerintah untuk membiayai kegiatan dalam pelaksanaan tiga lingkup kebijakan tersebut yang mana bersumber dari dana APBD atau sumber lainnya yang sah. Selain itu pembiayaan dan pendanaan juga dapat dilakukan melalui lembaga perbankan atau lembaga lainnya untuk memberikan permodalan bagi para pelaku industri mebel di Jepara.

Ketiga, implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) ini belum berjalan secara optimal. Pelaksanaannya belum dilaksanakan secara keseluruhan baik itu dari segi pelayanan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan industri mebel di Jepara serta masih banyak permasalahan di lapangan yang belum teratasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut, aspek perlindungan industri mebel, Pemerintah daerah Jepara sudah mengupayakan dengan maksimal, namun masih terdapat beberapa yang belum terlaksana. Pemerintah daerah Jepara hanya mampu membangun sarana dan prasana untuk mendorong pelaku industri mebel melalui penguatan infrastruktur jalan, jembatan dan pembentukan sentra industri mebel. Kemudian dari aspek pemberdayaan hanya dapat memberikan pelayanan seperti program pelatihan, pameran yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Selain itu juga terdapat lembaga asosiasi untuk menaungi pelaku industri mebel yang

bertujuan untuk ikut serta memajukan industri mebel. Sedangkan aspek pembinaan ini, Pemerintah daerah Jepara hanya memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan industri mebel seperti trend desain dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan pelaksanaan yang belum optimal tersebut, memang terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat. Kendala tersebut khususnya yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara selaku pelaksana kebijakan yaitu sebagai berikut :

Minimnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui sumber anggaran Disperindag Kabupaten Jepara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara yang digunakan untuk kebutuhan industri mebel Jepara. Akan tetapi, anggaran tersebut dirasa belum cukup untuk menjangkau semua pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan.

Kemudian berkaitan dengan kondisi pegawai Disperindag Kabupaten Jepara sebagai pelaksana kebijakan masih terbatas. Jumlah pegawai di bidang perindustrian dan perdagangan masing-masing hanya berjumlah 11 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu berjumlah 6 orang dan sisanya adalah staf non-ASN. Dengan terbatasnya pegawai, maka akan kesulitan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri (P3IM) Jepara. Masih banyak pegawai ataupun masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Perda tersebut

hanya diketahui oleh sekelompok orang yang bergabung dalam asosiasi saja. Apabila masyarakat mengetahuinya, maka Perda tersebut akan sangat berguna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Keempat, selain terdapat permasalahan dari segi pelaksana kebijakan terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku industri mebel yang menjadi faktor-faktor yang seringkali menghambat dalam mengembangkan usahanya. Sehingga faktor-faktor tersebut juga menjadi faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan kebijakan yang mana menjadikan hasil kebijakan ini tidak maksimal. Akhir-akhir ini, industri mebel sedang mengalami penurunan dan itu dapat dilihat pada nilai ekspor industri mebel di Jepara pada tahun 2017. Penurunan tersebut dapat diketahui dari data ekspor industri mebel di Jepara setiap tahunnya yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yakni sebagai berikut :

Tabel 1.3

Data Ekspor Industri Mebel Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Eksportir	Jumlah Negara	Nilai Ekpor (USD)
2014	223	106	114.781.164,54
2015	296	113	150.320.729,41
2016	307	113	174.042.524,73
2017	398	111	166.862.444,20

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun 2014-2017, Data Diolah

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan terjadi penurunan pada tahun 2017 disebabkan masih terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi

dilapangan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan bahan baku dan keterbatasan tenaga kerja mebel. Berkaitan dengan permasalahan bahan baku kayu, memang kondisinya semakin terbatas sehingga terjadi lonjakan harga. Apalagi saat ini bahan baku kayu diperoleh dari luar Kabupaten Jepara, maka setiap tahun harga kayu Perhutani terus naik. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan bahan baku kayu di Jepara semakin berkurang dan solusinya dengan mendatangkan kayu dari luar Jawa. Akan tetapi, mengakibatkan biaya produksi membengkak, sedangkan harga yang dijual biasanya murah. Sehingga akan sulit bagi para pelaku untuk menentukan harga produk.⁸

Permasalahan lain yaitu menurunnya minat masyarakat terhadap sektor industri mebel yang ditandai dengan kesulitan mencari tenaga kerja di bidang mebel. Suplai tenaga kerja semakin terbatas, bahkan untuk generasi selanjutnya akan terancam tidak ada generasinya lagi.⁹ Keterbatasan jumlah tenaga kerja tersebut akan mengganggu produktivitas industri mebel.¹⁰ Meskipun pelaku industri mebel memiliki modal dan bahan baku kayu, namun apabila tidak ada tenaga kerja maka kegiatan produksi tidak bisa berjalan dikarenakan dalam produk industri mebel membutuhkan tenaga kerja ahli dibidang tersebut.

Kemudian, munculnya investor-investor asing yang datang ke Jepara untuk mendirikan usaha. Maraknya iklim investasi yang masuk ke Jepara ini mengakibatkan munculnya pabrik-pabrik baru di sekitar daerah Mayong. Hal

⁸ <https://www.murianews.com/2016/09/10/94167/banyak-industri-mebel-jepara-gulung-tikar-ini-penyebabnya.html>, diakses pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 21.45 WIB

⁹ <http://www.koranmuria.com/2015/05/09/1334/industri-mebel-menghadapi-banyak-kendala.html>, diakses pada hri Senin, 6 Mei 2019, pukul 11.22 WIB

¹⁰ Bayu Adytiya Candra (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel*. Skripsi. Universitas Diponegoro

tersebut mengakibatkan masyarakat di Jepara cenderung lebih memilih kerja di pabrik. Oleh karena itu, saat ini semakin sulit bagi pengusaha mebel untuk mendapatkan tenaga kerja mebel di Jepara baik itu tukang kayu, tukang ukir dan tukang amplas.

Berdasarkan uraian mengenai gambaran umum tentang kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Jepara dan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Peraturan daerah Jepara No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) di Kabupaten Jepara”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang empirik dan teoritis yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana evaluasi Kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) di Kabupaten Jepara?
- 1.2.2 Apa sajakah faktor-faktor penghambat atau permasalahan dalam perkembangan industri mebel?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 Mendeskripsikan lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara baik itu dilihat dari sumber-sumber kebijakan, proses pelaksanaan, hasil kebijakan dan dampak yang diperoleh dari adanya kebijakan ini.
- 1.3.2 Mendeskripsikan lebih mendalam mengenai faktor-faktor dalam perkembangan industri mebel di Kabupaten Jepara baik itu berupa faktor sumberdaya, sosial, ekonomi dan kebijakan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna menilai suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan Pemerintah dapat terealisasi

dengan baik sehingga dapat diketahui suatu kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam hal ini, maka akan memberikan wawasan evaluasi kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Jepara.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan industri mebel di Jepara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman langsung tentang evaluasi kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Jepara yang belum berjalan maksimal.
- b. Bagi pemerintah, bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Kemudian sebagai bahan masukan dan koreksi dalam mengevaluasi Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Jepara. Sehingga diharapkan nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Jepara.
- c. Bagi masyarakat dan para stakeholder, dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui tingkat responsivitas Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penurunan industri mebel di Kabupaten Jepara.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai industri mebel di Jepara telah banyak dilakukan, karena industri ini merupakan sektor unggulan yang dapat menunjang perekonomian di daerah ini. Dari beberapa penelitian terdahulu maka dapat diketahui beberapa kajian penelitian mengenai industri mebel di Jepara dan evaluasi kebijakan. Diantara hasil penelitian, penulis menemukan beberapa data sebagai berikut :

Penelitian pertama yaitu Meily Murdiyani, (2015), yang berjudul “*Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Rangka Fasilitasi Terhadap Industri Mebel Dalam Perdagangan Bebas (Studi Kasus Berlangsungnya ACFTA)*”. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemda Jepara telah melakukan perannya secara kongrit dalam usaha pengembangan industri mebel diantaranya seperti penyediaan bahan baku, memfasilitasi permodalan dan pemasaran, peningkatan SDM, dan penguatan infrastruktur. Namun, masih terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan fasilitas yaitu berupa keterbatasan bahan baku, adanya proses yang berbelit terhadap fasilitas berupa modal, munculnya kompetitor baru baik pasar lokal maupun Internasional, kurangnya perlindungan sertifikasi dan HaKI, serta regenerasi yang sudah langka.

Meskipun program-program untuk meningkatkan industri ini sudah baik, namun pasti terdapat faktor yang dapat menghambat perkembangan industri mebel.¹¹

Sedangkan penelitian kedua yaitu, Bayu Adytiya Candra, (2018) yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel*”. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Perda tersebut dinilai belum berjalan secara maksimal walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Dalam aspek Pemberdayaan dan Pembinaan sudah berjalan namun dari aspek Perlindungan ada beberapa yang belum berjalan seperti yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku, asuransi industri mebel dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kendala yang dirasa belum bisa diatasi baik dari sumber daya, tenaga kerja, anggaran dan sosialisasi yang masih terlalu minim.¹²

1.5.2 Industri Sebagai Aktivitas yang Dikendalikan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan industri ini sudah berlangsung dimulai dari adanya revolusi Industri di Inggris pada abad ke 18. Perkembangannya ini mempengaruhi hubungan antar Negara dan dijadikan sebagai kekuatan besar dalam bidang

¹¹ Meily Murdiyani. (2015). *Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Rangka Fasilitasi Terhadap Industri Mebel Dalam Perdagangan Bebas (Studi Kasus Berlangsungnya ACFTA)*. Jurnal. Universitas Diponegoro.

¹² Bayu Adytiya Candra (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel*. Skripsi. Universitas Diponegoro

ekonomi. Selain Negara maju, negara berkembang juga mulai menjadikan sektor industri sebagai salah satu prioritas dalam aspek pembangunan ekonomi karena memberikan sumbangsih terbesar bagi pemasukan Negara. Sektor industri termasuk dalam urusan pemerintahan, setiap pemerintah berhak untuk mengatur perkembangan industri di daerah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengola dan mengembangkan potensi industri di daerahnya masing-masing. Jadi sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat membangun perekonomian di suatu negara karena produk-produk yang dihasilkan mempunyai nilai tukar yang tinggi. Menurut UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.¹³

Industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa sudut pendekatan. Di Indonesia, industri digolongkan antara lain berdasarkan kelompok komoditas, berdasarkan skala usaha, dan berdasarkan hubungan arus produknya. Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan “buku Internasional klasifikasi industri (Internatonal Standard of Industrial Classification, ISIC).” Penggolongan menurut ISIC ini didasarkan pada pendekatan kelompok komoditas, yang secara garis besar dibedakan menjadi 9 golongan yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁴

¹³ UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

¹⁴ Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. Hlm 232

1. Industri makanan, minuman, dan tembakau
2. Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit
3. Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga
4. Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan
5. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik
6. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi, dan batu bara
7. Industri logam dasar
8. Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya
9. Industri pengolahan lainnya

Kemudian menurut menurut Philip Kristatanto industri ini dapat diklasifikasikan menurut sesuai dengan golongannya yaitu sebagai sebagai berikut.¹⁵

1) Industri dasar atau hulu

Industri hulu terdiri atas industri kimia dasar, industri mesin, logam dasar, dan elektronik. Industri hulu ini memiliki sifat padat modal, berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya biasanya dipilih atas dasar pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Dalam industri ini membutuhkan perencanaan yang matang seta tahapan

¹⁵ Verawati, Sri. 2012. *PERAN MODAL SOSIAL DALAM STRATEGI INDUSTRI KREATIF (Studi di Sentra Kerajinan Kayu Jati di Desa Jepon Blora Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

pembangunannya, mulai dari perencanaan sampai operasionalnya agar dapat berjalan dengan lancar.

2) Industri hilir

Industri hilir merupakan proses perpanjangan industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat dengan pasar, dan menggunakan teknologi yang teruji dan padat karya. Industri kecil biasanya berlokasi di Pedesaan dan Perkotaan. Sebetulnya hampir sama dengan industri hilir namun menggunakan peralatan yang lebih sederhana. Saat ini, industri hilir mulai mendapatkan perhatian yaitu dengan munculnya industri kreatif.

Sedangkan penggolongan industri jika dilihat dari pendekatan skala usaha. Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan skala industri menjadi 4 golongan berdasarkan jumlah tenaga kerja tiap unit usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Industri Besar, jumlah pekerjanya 100 orang atau lebih
2. Industri Sedang, jumlah pekerjanya antara 20-99 orang
3. Industri Kecil, jumlah pekerjanya antara 5 sampai 19 orang
4. Industri/Kerajinan Rumah Tangga, jumlah pekerjanya < 5 orang.

Berdasarkan pada penggolongan industri menurut Philip Kristianto, industri mebel ini tergolong sebagai industri hilir. Proses produksi industri mebel ini lebih panjang karena mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan baku kayu seperti kayu jati, mahoni, sengon laut ini diolah para pelaku industri mebel menjadi berbagai macam furniture perabotan rumah. Hal tersebut dikarenakan

proses produksinya menggunakan berbagai macam teknologi atau mesin produksi. Selain itu, juga menjadi salah satu industri kreatif karena dibuat atas dasar inovasi dan kreatifitas dari si pelaku industri mebel.

1.5.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri

Menurut High Smith, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan industri, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Faktor Sumber Daya

Suatu faktor yang berkaitan dengan sumber daya alam yang berperan penting dalam mendukung sebuah industri yaitu sebagai berikut :

1. Bahan mentah

Bahan mentah merupakan sumber yang terpenting untuk memproduksi sebuah produk dalam industri. Banyak usaha industri yang didirikan atau ditempatkan berdekatan dengan sumber bahan mentah atau dengan pabrik lain yang produknya dijadikan sebagai bahan baku.

2. Sumber energi

Sumber energi yang digunakan dalam kegiatan industri adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, tenaga listrik, kayu, dan sebagainya.

¹⁶ <https://www.psychologymania.com/2013/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-industri.html>, diakses pada hari Selasa, 24 September 2019, pukul 08.11 WIB.

3. Penyediaan air

Air ini juga turut sebagai pendukung karena berguna untuk bahan pendingin, pencampur, dan pencuci sehingga dalam menempatkan dan menentukan lokasi industri harus memperhatikan air.

5. Iklim dan bentuk lahan

Iklim juga mempengaruhi aktivitas kerja. Namun, adanya perkembangan teknologi pengaturan udara bukan lagi menjadi faktor yang menentukan. Bentuk lahan berpengaruh terhadap penempatan lokasi industri, baik terhadap bangunan industri maupun prasarana lalu lintas angkutan atau distribusi.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap usaha dan perkembangan industri antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan tenaga kerja

Kualitas maupun kuantitas tenaga kerja sangat berpengaruh dalam proses produksi. Penyediaan tenaga bergantung pada jumlah tenaga kerja yang tersedia dan tingkat upah yang berlaku. Dan jika jumlah tenaga yang tersedia terbatas maka dapat menghambat produktivitas sebuah industri.

2. Keterampilan dan kemampuan teknologi

Suatu industri modern tentunya pasti mempergunakan mesin dan produksi masal sehingga membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terlatih.

3. Kemampuan berorganisasi

Jika suatu industri semakin, maka semakin kompleks pula pengorganisasiannya. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang berkompeten dalam mengorganisasikannya.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga berpengaruh dalam sebuah industri, yaitu sebagai berikut:

1. Pemasaran

Pemasaran sama pentingnya dengan bahan mentah dan sumber energi terhadap perkembangan industri. Pemasaran ini dapat menentukan hidup matinya suatu industri. Sedangkan potensi pasaran ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan daya belinya.

2. Transportasi

Biaya transportasi sangat penting bagi industri karena bahan mentah harus diangkut dan hasilnya dipasarkan. Sehingga dibutuhkan untuk mendistribusikan produk-produk yang akan dijual.

3. Modal

Modal juga sangat diperlukan untuk kegiatan industri dan tentunya memerlukan modal yang cukup besar. Pada umumnya modal lebih dinamis yaitu bisa bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain dan bisa diperoleh di mana saja. Namun demikian, sumber modal yang penting adalah yang berasal dari penduduk daerah atau negara berupa penghasilan negara dari pajak dan retribusi, tabungan penduduk, dan sebagainya.

d. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha dan perkembangan industri yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan perpajakan dan tariff
2. Pembatasan impor-ekspor (proteksi hasil industri dalam negeri dan mendorong ekspor)
3. Pembatasan jumlah dan macam industri, penentuan daerah industri, pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha (favourable)

1.5.3 Teori Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan

1.5.3.1 Kebijakan Publik

Sebelum memaparkan mengenai evaluasi kebijakan publik, haruslah mengetahui lebih dalam mengenai apa itu kebijakan publik serta proses bagaimana sebuah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Menurut Carl I. Friedrich, ia mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Dalam penelitian kebijakan dapat dilihat dari sudut substansinya, yaitu memahami kebijakan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagaimana hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pelaku kebijakan.

¹⁷ Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal 126

Kemudian terdapat pendapat lain yang diungkapkan oleh Thomas R Dye, mendefinisikannya sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* atau yang diartikan sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa sebuah kebijakan publik merupakan suatu perwujudan tindakan yang akan dilakukan pemerintah ataupun pejabat dan itu tidak semata atas keinginannya namun juga atas usulan dari masyarakat sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.¹⁸

Dari beberapa definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aktivitas Negara yaitu suatu tindakan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan bertujuan untuk mengatasi masalah publik melalui pola-pola tertentu sehingga terbentuklah suatu kebijakan atau program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak semua kebijakan akan berjalan lancar dan berhasil dalam mencapai tujuan tersebut karena banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan tersebut. Penyebab kegagalan itu dapat diketahui dengan melakukan evaluasi kebijakan.

a. Tahap-Tahap Kebijakan

Terdapat pembagian tahapan-tahapan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Hal tersebut tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mengkaji

¹⁸ Ibid

kebijakan publik. Dan menurut William N. Dunn dalam Samodra Wibawa yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda adalah sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik karena dalam proses inilah dapat memaknai yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Dalam penyusunan agenda ini untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Menurut William N. Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah masalah publik yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk dicarikan solusi pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi / Legitimasi Kebijakan

Menetapkan salah satu dari beberapa alternatif kebijakan yang telah dipelajari menjadi kebijakan resmi pemerintah. Pada tahap ini pengambilan kebijakan dilakukan terbuka dan diinformasikan secepat-cepatnya kepada masyarakat melalui lembaran negara ataupun media. Tujuan legitimasi

¹⁹ Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 9

adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan / penerapan oleh unit-unit terkait setelah suatu kebijakan dirumuskan demi mencapai suatu tujuan bersama. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

1.5.3.2 Evaluasi Kebijakan

Di dalam ilmu pengetahuan, jika kebijakan dipandang sebagai suatu proses berurutan maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir. Menurut Charles O. Jones, mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang direncanakan untuk menilai hasil program pemerintah yang memiliki

perbedaan dalam spesifikasi objek, teknik, pengukuran dan metode analisa.²⁰ Aktivitas tersebut untuk mengetahui dampak kebijakan baik yang diharapkan atau tidak terhadap masalah ataupun masyarakat dalam situasi sekarang ataupun yang akan datang.²¹ Menurut Lester dan Stewart menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan dari suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.²² Menurutnya, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. *Tugas pertama*, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Kemudian *tugas kedua*, adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan *standard* atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam tugas kedua, setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak yang dihasilkan.²³

Sedangkan James Anderson, membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga yaitu tipe pertama, evaluasi kebijakan publik dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh

²⁰ Islamym M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara. Hal 115

²¹ Ibid, 117-119

²² Akbar, Muh Firyal & Mohi, Widya Kurniati. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing. Hlm 15

²³ Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, hlm 226

mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan fungsional yang sistematis untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dengan melihat tujuan-tujuan yang telah dicapai melalui program-program kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

a. Perlunya Evaluasi Kebijakan

Terdapat beberapa argumen perlunya melakukan evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut :²⁵

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan yaitu seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya
2. Mengetahui suatu kebijakan berhasil atau gagal dengan melihat tingkat efektifitasnya. Maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan. Maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dan yang merasakan manfaat kebijakan
4. Menunjuk pada manfaat suatu kebijakan, apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Para stakeholder, terutama kelompok sasaran

²⁴ Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta : CAPS.PT. Buku Seru. hlm 168

²⁵ Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University

maka tidak diketahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program

5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama karena pada akhirnya evaluasi suatu kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan kepada proses pengambilan kebijakan.

b. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dalam perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh William Dunn, pendekatan-pendekatan tersebut antara lain evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan. Berikut dijelaskan masing-masing dari ketiga pendekatan tersebut :²⁶

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah suatu pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial
2. Evaluasi Formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid

²⁶ Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University

dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut berdasarkan tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dari segi metode evaluasi formal menggunakan metode yang sama dengan evaluasi semu. Perbedaannya dengan evaluasi semu ialah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspeksifikan tujuan dan target kebijakan

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan dengan menggunakan metode-metode dekriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan.

c. Indikator Evaluasi Kebijakan

Pengukuran evaluasi bervariasi sesuai dengan tipe evaluasinya. Walaupun pengukuran evaluasi bervariasi secara umum, menurut Bridgman and Peter Davis Glyn kinerja evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu pada empat indikator pokok, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Indikator masukan (*Input*) memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini meliputi sumber daya manusia, uang, infrastruktur pendukung lainnya
2. Indikator proses (*process*) memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efesiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu
3. Indikator hasil (*output*) memfokuskan penelitian pada hasil atau produk yang dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tersebut
4. Indikator dampak (*outcome*) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

²⁷ Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)*, hlm 138.

Tabel 1.4

Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator Evaluasi Kebijakan	Fokus Penilaian
1.	<i>Input</i>	<ul style="list-style-type: none">• Apakah sumber daya pendukung dan bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ?• Berapakah Sumber Daya Manusia (SDM), Uang dan infrastruktur pendukung yang lainnya yang diperlukan ?
2.	<i>Process</i>	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ?• Bagaimanakah efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?
3.	<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none">• Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik tersebut ?• Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut ?
4.	<i>Outcomes</i>	<ul style="list-style-type: none">• Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?• Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?• Adakah dampak negatifnya? seberapa seriuskah dampak tersebut ?

Sumber : Abdul Kahar Badjuri dan Teguh Yuwono. 2002:138

Berdasarkan tabel diatas, evaluasi berupa penilaian suatu kebijakan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dari suatu pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, dalam menilai keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dinilai dari beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh William Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan,

pemerataan responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 1.5

Kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah ?	Biaya tetap Efektifitas tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survey warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) benar-benar berguna atau bernilai ?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : Akbar, Muh Firyal & Mohi, Widya Kurniawati. (2018):73

Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang menjadi tolak ukur dalam proses kegiatan evaluasi kebijakan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai untuk menjawab atas penelitian yang ingin dilakukan.

1.5.4 Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel

1.5.4.1 Perlindungan Industri Mebel

Perlindungan industri mebel ini merupakan upaya menjaga dan melindungi industri mebel dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan industri mebel. Dengan adanya perlindungan dapat memberikan perlindungan atas upaya pemberdayaan dan pengembangan industri mebel dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat. Sesuai dengan isi Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM), terdapat upaya perlindungan industri mebel yang dilakukan melalui :

1) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri mebel

Pemerintah daerah menyediakan prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan untuk kelancaran distribusi produk mebel, dan penyediaan jaringan listrik, pembangunan terminal kayu terpadu, penggergajian kayu log, pengopenan kayu di setiap sentra industri mebel serta pelabuhan peti kemas dan penggunaannya. Sedangkan untuk sarana yang disediakan bertujuan untuk memproduksi mebel secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga yang terjangkau bagi pelaku mebel yang meliputi bahan baku kayu yang berkualitas, peralatan dan mesin produksi mebel sesuai standar mutu. Sarana yang disediakan Pemda juga dalam bentuk pemberian subsidi atau hibah yang diberikan kepada pelaku industri mebel.

2) Kepastian berusaha

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian berusaha industri mebel bagi para pelakunya dengan menetapkan sentra-sentra industri mebel di setiap daerah di Jepara yang memiliki potensi sumber daya mebel. Kemudian dengan memberikan bantuan kepada pelaku industri mebel untuk memasarkan produksinya baik lokal maupun internasional. Sedangkan dalam hal bahan baku kayu dapat berkoordinasi dengan perhutani dalam penentuan harga jual kayu log perhutani dan melakukan kerjasama pengadaan kayu log dengan daerah penghasil kayu log.

3) Harga produk mebel dan Pencegahan persaingan usaha tidak sehat

Pemerintah daerah menetapkan harga jual produk mebel untuk menciptakan standar harga jual produk mebel yang menguntungkan dan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

4) Asuransi Industri Mebel

Untuk melindungi pelaku usaha mebel yang mengalami kerugian akibat bencana alam, kebakaran gudang/stok barang/stok bahan baku, gagal bayar dari pembeli lokal atau International, kerusakan/kehilangan barang dagangan dan lain-lain dapat diberikan asuransi berupa kemudahan untuk menjadi peserta asuransi, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan sosialisasi program asuransi industri mebel kepada pelaku usaha mebel kecil dan menengah serta adanya bantuan pembayaran premi

1.5.4.2 Pemberdayaan Industri Mebel

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang penting dalam membangun masyarakat agar dapat lebih maju dan berkembang. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaidi, bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²⁸ Pemberdayaan industri mebel adalah suatu upaya untuk menumbuhkan iklim dan pengembangan usaha terhadap industri mebel. Adanya pemberdayaan diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Melihat industri ini menjadi sektor unggulan di daerah Jepara. Jadi Pemerintah daerah Jepara fokus untuk mengembangkannya. Sesuai dengan isi Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM), terdapat upaya pemberdayaan industri mebel yang dilakukan melalui :

1) Pendidikan dan Pelatihan Industri Mebel

Pendidikan dan pelatihan industri mebel ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang dilakukan melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan, pemberian beasiswa bagi pelaku usaha mebel untuk mendapatkan pendidikan di bidang permebelan, dan pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang industri mebel.

²⁸ Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perpektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media. Hlm 42

2) Penyuluhan dan Pendampingan Industri Mebel

Pendampingan ini dilakukan agar pelaku usaha mebel dapat melakukan tata cara penyediaan bahan baku dan bahan penolong, proses produksi dan pemasaran yang baik, analisis kelayakan usaha dan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Sehingga dapat mempermudah mereka dalam menghasilkan produk-produk industri mebel.

3) Standar Kualitas Mebel

Setiap pelaku usaha industri mebel yang memasarkan produknya harus memenuhi standar kualitas produk mebel. Pemda berwenang untuk membina pelaku usaha industri mebel agar memenuhi standar kualitas produk mebel.

4) Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Mebel

Pemda Jepara melakukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel dengan tersedianya pusat perdagangan dunia produk mebel. Sehingga nantinya dapat lebih meningkatkan industri mebel di mata dunia dan memudahkan para pelaku industri mebel dalam hal memasarkan produk mereka.

5) Pola Kemitraan Industri Mebel

Kemitraan ini dilaksanakan untuk mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar pelaku usaha industri mebel di taraf kecil, menengah dan besar. Selain itu juga untuk mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Dengan adanya kerjasama juga dapat mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan

usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pelaku usaha industri mebel.

6) Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Industri Mebel

Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan ini dilakukan untuk memudahkan pelaku industri mebel untuk memulai atau melanjutkan usahanya. Pemberian fasilitas tersebut dilakukan untuk memberikan pinjaman modal agar memiliki sarana produksi mebel, pemberian bantuan penguatan modal bagi pelaku usaha mebel kecil dan menengah, pemberian subsidi bunga kredit program dan atau imbalan jasa penjaminan, dan juga pemanfaatan dana tanggung-jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dari badan usaha.

7) Kemudahan Mengakses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar kualitas produk mebel. Kemudahan akses tersebut meliputi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama alih teknologi dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha mebel kecil dan menengah untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

8) Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Industri Mebel.

Terdapat kelembagaan yang berkembang di Jepara yang di bidang usaha khususnya industri mebel yang terdiri dari kelompok usaha bersama, gabungan kelompok usaha bersama, asosiasi pelaku usaha mebel dan dewan produk mebel daerah. Kelembagaan tersebut wajib bergabung dan berperan

aktif dalam memajukan industri mebel di Jepara dan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam industri mebel. Sedangkan Asosiasi pelaku usaha mebel merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk untuk anggota dan dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan pelaku usaha mebel.

1.5.4.3 Pembinaan Industri Mebel

Pembinaan merupakan sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan, karena setiap manusia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan tersebut tidak dapat dicapai, maka manusia akan berusaha untuk memperbaiki pola kehidupannya yang lebih baik. Pembinaan menurut Mathis, yakni suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu dalam mencapai tujuan organisasi tertentu.²⁹ Pemerintah daerah wajib untuk membina pelaku usaha industri mebel perorangan, kelompok, dan atau koperasi dalam menghasilkan sendiri sarana produksi mebel yang berkualitas.

Pembinaan industri mebel ini merupakan upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing industri mebel. Selain itu juga berguna untuk membimbing pelaku usaha industri mebel dan memberikan bantuan konsultasi mengenai permasalahan yang tegah dihadapi oleh pelaku industri

²⁹ Mathis Robert Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 112

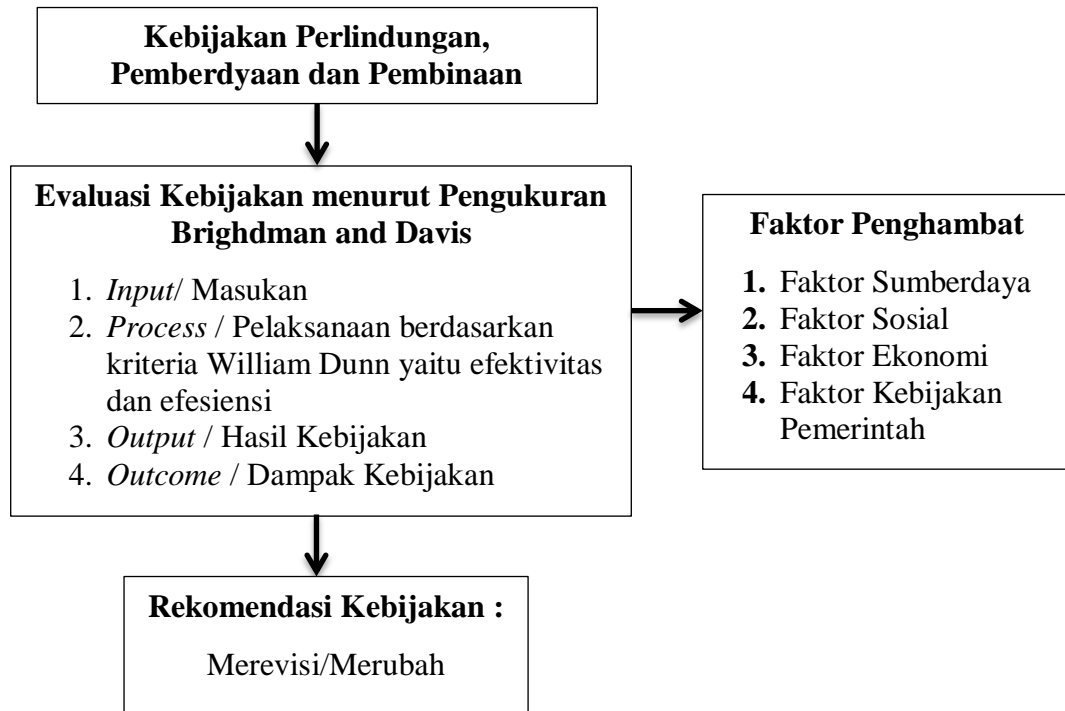
mebel. Sesuai dengan isi Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM), pembinaan terhadap pelaku usaha mebel dapat dilakukan dalam bentuk, sebagai berikut :

- a. Membimbing pelaku usaha mebel yang sesuai dengan kepentingan pelaku usaha, agar tidak ada pihak yang dirugikan,
- b. Mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian permebelan.
- c. Membantu pengembangan jaringan usaha mebel dan kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha mebel
- d. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.1

Kerangka Pikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.6

Operasionaliasasi Konsep

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	Kebijakan Publik berupa Kebijakan Perlindungan Pemberdayaan dan	Perlindungan Industri Mebel	a. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri mebel b. Kepastian berusaha

	<p>Pembinaan Industri Mebel</p> <p>Sebuah aktivitas Negara yaitu tindakan yang dipilih untuk dilakukan pemerintah karena terdapat usulan dari masyarakat yang bertujuan untuk pemecahan masalah.</p> <p>Kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel sebagai upaya dari Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi industri mebel di Jepara</p>		<p>c. Pencegahan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>d. Pemberian bantuan hukum dan asuransi industri mebel.</p>
		<p>Pemberdayaan Industri Mebel</p>	<p>a. Pendidikan dan pelatihan industri mebel</p> <p>b. Penyuluhan dan pendampingan industri mebel</p> <p>c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel</p> <p>d. Pola kemitraan industri mebel</p>

			<ul style="list-style-type: none"> e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan industri mebel f. Penguatan kelembagaan pelaku usaha industri mebel
		Pembinaan Industri Mebel	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialiasi dan pelatihan
		<i>Input</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumberdaya sebagai pelaksana kebijakan b. Sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam melaksanakan kebijakan c. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan
		<i>Process</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan kebijakan b. Target dan sasaran c. Kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan
			<ul style="list-style-type: none"> pelaku industri mebel d. Mekanisme pelaksanaan pelayanan kebijakan e. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan

			pelaksanaan kebijakan
		<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil/produk dari pelaksanaan kebijakan? b. Kesesuaian hasil kebijakan dengan tujuan yang diharapkan c. Ketepatan sasaran kebijakan d. Jumlah sasaran kebijakan yang berhasil tertangani
		<i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dampak bagi sasaran kebijakan b. Dampak positif dan negatifnya
2.	Faktor-faktor Penghambat Industri Mebel Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sebuah usaha atau industri, yang mana dapat menghambat atau mengembangkan industri.	Faktor Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan bahan baku kayu di Jepara
		Faktor Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. ketersediaan tenaga kerja industri mebel b. Upah yang ditawarkan menjadi tenaga kerja industri mebel c. Kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja industri mebel di Jepara
		Faktor Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi pangsa pasar industri mebel di Jepara b. Strategi pemasaran industri mebel

			c. Kondisi modal pelaku industri mebel
		Faktor Kebijakan Pemerintah	a. Terdapat kebijakan pemerintah yang menghambat industri mebel di Jepara b. Ketentuan ekspor industri mebel c. Ketentuan pajak bagi pelaku industri mebel

Sumber : Data Diolah tahun 2020

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan yang spesifik, yaitu untuk menemukan, menggambarkan, mengembangkan atau mengetahui suatu kebenaran dari fenomena yang diteliti dengan cara mengumpulkan, menyusun dan merangkai suatu masalah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam karya ilmiah. Berdasarkan buku John W. Creswell, metode penelitian terdapat berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya.³⁰ Metode penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan *mix-methods* (campuran kualitatif dan kuantitatif).

³⁰ John W. Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 332

1.8.1 Desain Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *mix method*. Dalam penelitian ini lebih utama menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif sebagai data pendukung. Pencampuran dan penggabungan data ini dapat dinyatakan memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang rumusan masalah daripada dilakukan satu demi satu.³¹ Mengacu pada pengertian dalam buku John W. Creswell yang berjudul *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, yang dimaksud dengan metode penelitian campuran adalah:

“Pendekatan untuk menyelidiki suatu objek dengan mengombinasikan bentuk penelitian kualitatif dan bentuk penelitian kuantitatif. Metode ini juga melibatkan asumsi filosofis, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta campuran antara dua pendekatan dalam sebuah penelitian.”³²

Menurut Creswell, strategi-strategi dalam *mixed methods*, yaitu:

1. Strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*)

Strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan *interview* terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan survey. Strategi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Strategi Eksplanatoris Sekuensial

Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif

³¹*Ibid.*, hlm.288

³²*Ibid.*, hlm.330

yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.

b. Strategi Sksploratoris Sekuensial

Strategi ini merupakan kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.

c. Strategi Transformatif Sekuensial

Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada masing-masing tahap penelitian.

2. Strategi Metode Campuran Konkuren / Sewaktu-waktu (*concurrent mixed methods*)

Penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Terdapat tiga strategi pada strategi metode campuran konkuren, yaitu:³³

³³ Creswell, J. W. 2010. *Research design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. Hal 320-324

a. Strategi Triangulasi Konkuren

Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.

e. Strategi Embedded Konkuren

Strategi ini hampir sama dengan model triangulasi konkuren, karena sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Yang membedakannya adalah model ini memiliki metode primer yang memandu proyek dan data sekunder yang memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode sekunder yang kurang begitu dominan/berperan (baik itu kualitatif maupun kuantitatif) ditancapkan (*embedded*) ke dalam metode yang lebih dominan (kualitatif atau kuantitatif).

c. Strategi Transformatif Konkuren

Seperti model transformatif sekuensial yaitu dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu. Prosedur metode campuran transformatif (*transformative mixed methods*) merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif *overarching* yang didalamnya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil yang diharapkan dari penelitian.

1.8.2 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel mempunyai keterkaitan satu sama lain, karena sampel merupakan bagian dari populasi. Dan merupakan suatu keseluruhan dari variabel yang akan diteliti.³⁴

1.8.2.1 Populasi

Populasi menurut Sabar merupakan keseluruhan subyek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi. Sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah yang digeneralisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.³⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Jepara yang menjadi pelaku industri mebel baik itu pengusaha mebel eksportir, pengrajin industri mebel di Kabupaten Jepara.

1.8.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian atau jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi atau bias dikatakan sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi yang telah ditentukan. Sehingga sampel tersebut dapat mewakili populasi. Sampel ini

³⁴ Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Copyright@2019 Penerbit Media Sahabat Cendekia. Hal 92

³⁵ *Ibid*, Hal 91

diambil karena populasi yang terlalu besar, jika peneliti mempelajari semuanya maka akan mengalami kesulitan.³⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Jepara yang menjadi pelaku industri mebel baik itu pengusaha mebel eksportir, pengrajin, tenaga kerja di bidang industri mebel di Kabupaten Jepara.

1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan secara sengaja) untuk memperoleh *key informants* (orang-orang yang mengetahui dengan benar, terpercaya, dan benar-benar memahami konteks penelitian ini) berdasarkan tujuan penelitian serta, peneliti juga dapat memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari beberapa isu sentral. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, *random*, atau daerah, melainkan didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁷ Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode *snowball*, yakni mengidentifikasi kasus-kasus tertentu melalui sejumlah orang yang dihubungi secara berangkai yang bertujuan untuk mendapatkan tambahan informasi yang dijadikan sebagai sumber data tambahan.

³⁶ *Ibid*, Hal. 95

³⁷ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal 126

Dalam penelitian ini besarnya sampel diambil berdasarkan perhitungan sampel dengan rumus Frank Lynch (1974: 18)³⁸ sebagai berikut.

$$n = \frac{Nz^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + z^2 \cdot p(1-p)}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

z = Nilai Variabel Normal

1. Nilai variabel normal (2,58) untuk tingkat kepercayaan 99%
2. Nilai variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%
3. Nilai variabel normal (1,65) untuk tingkat kepercayaan 90%

p = Harga Patokan Tertinggi (0,50)

d = Sampling Error

1. 0,01 untuk z = 2,58
2. 0,05 untuk z = 1,96
3. 0,10 untuk z = 1,65

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

³⁸<http://digilib.unila.ac.id/1291/6/BAB%20III.pdf> , diakses pada 18 Desember 2017 pukul 09:40 WIB

$N = 5.870$ (data BPS Jumlah Unit Usaha Furniture Kayu Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2016)

$z = 1,65$ maka $d = 0,10$

$$\begin{aligned}n &= \frac{Nz^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + z^2 \cdot p(1-p)} \\&= \frac{5.870 (1,65)^2 \cdot 0,50(1-0,50)}{5.870 (0,10)^2 + 1,65^2 \cdot 0,50 (1-0,50)} \\&= \frac{5.870 (2,7225) \cdot 0,25}{5.870 (0,01) + 2,7225 \cdot 0,25} \\&= \frac{3.995,268}{58,7 + 0,680625} \\&= \frac{3.995,268}{59,380} \\&= 67\end{aligned}$$

$p = 0,50$

Hasil responden tersebut yaitu 67, namun dibulatkan menjadi 68 responden.

1.8.4 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dari fenomena atau peristiwa yang sebenarnya yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara,

kantor sekretariat HIMKI, APKJ, dan Kadin serta dilingkup di Kabupaten Jepara khususnya di wilayah sentra industri mebel di Jepara. Alasan mengapa peneliti memilih Kabupaten Jepara sebagai situs penelitian adalah karena Jepara dikenal sebagai Kota Ukir, yang mana mayoritas masyarakatnya memiliki usaha industri mebel.

1.8.5 Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dan memiliki data secara detail dan akurat berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap penulis memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi informan yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian Kabupaten Jepara
2. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jepara
3. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Kabupaten Jepara
4. Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ)
5. Pelaku Industri Mebel yaitu Pengusaha Industri Mebel dan Pengrajin Industri Mebel.

1.8.6 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data yang berupa dokumen, arsip, dan data yang telah ada sebelumnya untuk mengamati dan mengukur mengenai Kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM)

sebagai kebijakan yang mengatur mengenai industri mebel di Jepara sebagai sektor industri unggulan di daerah tersebut. Kemudian juga dilakukan dengan mencatat hasil wawancara dengan responden atau *key informants* yang mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan kebijakan P3IM serta memberikan kuesioner pelaku industri mebel untuk mengetahui persepsinya mengenai pelaksanaan kebijakan P3IM.

1.8.7 Sumber Data

Dalam suatu proses pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil. Adapun data atau sumber penulisan penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berupa:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data melalui wawancara maupun observasi mendalam kepada narasumber-narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh bersifat subyektif dikarenakan berasal dari sudut pandang berbeda setiap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen maupun literatur yang dianggap terkait dengan judul penelitian seperti buku, jurnal, tesis maupun disertasi, dokumen, artikel. Sehingga dapat diperoleh dari berbagai referensi terkait evaluasi kebijakan dan industri mebel di Jepara.

1.8.8 Teknik Penunpan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian *mix method* atau metode campuran, dimana metode campuran merupakan gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara face to face. Peneliti berusaha melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang dianggap penting untuk dimintai keterangan. Narasumber haruslah orang yang tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait fokus penelitian agar penelitian tersebut dapat akurat dan efisien. Dalam wawancara mendalam, peneliti juga berusaha membangun kepercayaan (*trust*) dengan narasumber sehingga data yang didapat lebih lengkap dan jelas. Wawancara mendalam ini akan dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jepara, Kepala Asosiasi atau Lembaga di bidang Kewirausahaan seperti HIMKI, APKJ, Kadin Kabupaten Jepara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui berbagai macam sumber tertulis atau dokumen terkait dengan informan atau tempat dimana

informan melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai industri mebel di Kabupaten Jepara.

c. Studi Kepustakaan

Peneliti mencari berbagai literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti akan mencari buku-buku, jurnal, media cetak serta referensi-referensi lain yang terkait dengan penelitian ini sehingga data menjadi lebih lengkap. Data yang digunakan seperti evaluasi kebijakan, industri dan hal lain yang berkenaan dengan permebelan di Kabupaten Jepara.

d. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang akan menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan terhadap para pelaku industri mebel di lingkup wilayah sentra industri mebel Jepara.

e. Survey

Menurut Masri Singarimbun, survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Tujuan dilakukannya survey dalam penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan umum serta mengetahui sikap dan seberapa jauh masyarakat Kabupaten Jepara menilai Kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) dalam meningkatkan industri ini di Jepara. Data didapatkan melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³⁹

1.8.9 Analisis dan Interpretasi Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan untuk kemudian memperjelas gambaran hasil dari penelitian. Data yang nantinya akan dianalisis adalah data dari hasil wawancara dan studi dokumentasi kualitatif tentang Evaluasi Kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM). Kemudian terdapat teknik lain yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Setelah menganalisis data kemudian dilanjutkan dengan keabsahan data kualitatif dengan cara triangulasi yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari informan satu dengan informan yang lain. Dalam penelitian *mixed methods*, analisis data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Analisis campuran bersamaan, yaitu analisis terhadap data kualitatif dan data kuantitatif yang dilakukan secara bersamaan.
2. Analisis kualitatif-kuantitatif bertahap, yaitu analisis terhadap data kualitatif diikuti dengan analisis data kuantitatif sebagai penegasan.

³⁹ Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Hal 162

3. Analisis kuantitatif-kualitatif bertahap, yaitu analisis data kuantitatif diikuti dengan analisis data kualitatif.

Penelitian ini menggunakan analisis campuran yang mana data dianalisis secara bersamaan baik dari data kualitatif kemudian diikuti data kuantitatif.

1.8.10 Kualitas Data

Untuk teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Teknik triangulasi adalah *“colleting information from a diverce range of individuals and setting, using a variety of methods”*.⁴⁰ Yakni suatu teknik yangdigunakan untuk memastikan keabssahan atau kesahihan data melalui *cross check* antara informan yang satu dengan informan lainnya. Atau bisa juga menggunakan variasi metode lain, seperti membandingkan informasi dari informan dengan fakta atau data yang ditemukan melalui observasi atau dokumentasi.⁴¹ Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis evaluasi Kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel di Jepara yang mana dapat dinilai berdasarkan pengukuran menurut Brighdman and Davis dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peningkatan industri mebel di Jepara. Dalam penelitian menggunakan triangulasi, ada 3 yaitu :

⁴⁰ Maxwell, J.A. (1996). *Qualitative research design: An interactive approach* . Thousand Oaks, CA: Sage.. Hal 93-94

⁴¹ *Ibid* 191

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

2. Triangulasi sumber data

Menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data seperti dokumen, arsip, catatan resmi yang merupakan lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Masing-masing cara tersebut akan menghasilkan bukti dan selanjutnya akan memberikan pandangan mengenai fenomena yang diteliti sehingga menghasilkan keluasan pengetahuan.

3. Triangulasi Teori

Hasil dari penelitian kualitatif yang menghasilkan sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut diselaraskan dengan perspektif teori yang relevan. Triangulasi teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode, dikarenakan menggunakan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sehingga dianalisis berdasarkan data wawancara, observasi dan survey.